



PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, DAK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

*Rizka Nur Rahmawati¹, Hesti Eka Pratiwi², Mila Lisniwati³, Lutfiah Dwi Afriani⁴,
Akbar Kharisma Haryadi⁵

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta¹²³⁴⁵

*Alamat Korespondensi: rizka.rahmawati14@kemenkeu.go.id

Abstract

Central Java Province has the second highest poverty rate in the nation, second only to the Special Region of Yogyakarta. This research aims to determine the influence of regional fiscal independence, the Special Allocation Fund (DAK), and regional capital expenditures toward poverty in Central Java Province. This study employs a quantitative approach, utilizing a fixed-effects panel data model. The panel data were obtained by combining time-series data for 2017-2022 and cross-section data from 35 regencies and cities in Central Java. The results showed that all independent variables had a simultaneous effect on poverty. Notably, the level of regional fiscal independence has a positive effect, while DAK has a negative effect. Furthermore, the study also found that regional capital expenditure exhibits a positive correlation with poverty.

Abstrak

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka tertinggi kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode analisis regresi linear berganda data panel (*Fixed-Effect Model*). Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari data panel yaitu gabungan dari data *time-series* tahun 2017-2022 dan data *cross-section* dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan Belanja Modal Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Keywords: Belanja modal daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), desentralisasi fiskal, kemiskinan, tingkat kemandirian fiskal.



JEL Classification: H71, H75**PENDAHULUAN**

Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kelima sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu mencapai 37.032.410 jiwa dan jumlah angka kepadatan penduduknya mencapai 1.120 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023). Christiani et al. (2014) berpendapat bahwa kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang dimungkinkan berdampak kepada kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lainnya.

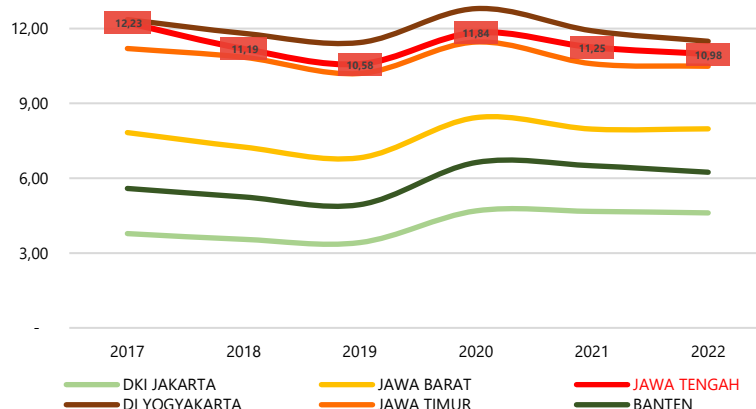
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tidak pernah lepas dari perkembangan suatu negara (Istan, 2017). Perkembangan struktur ekonomi menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut menciptakan lapisan masyarakat atau *gap* berdasarkan pendapatan. Diperlukan peran dari negara sebagai suatu badan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan dan memberi stimulus agar

dapat mengurangi kemiskinan (Azis et al., 2019).

Grafik 1 menunjukkan perkembangan angka tingkat kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022. Dalam enam tahun terakhir, provinsi dengan angka rata-rata kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni sebesar 11,97% diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,34%. Menurut Wahyudi & Rejekiingsih (2013), rata-rata kemiskinan absolut Provinsi Jawa Tengah tergolong dalam kategori kemiskinan tinggi atau *Hard Core Poverty* dengan angka >10%.

Rata-rata keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022 adalah 0,48. Angka tersebut menunjukkan jumlah pengeluaran masyarakat semakin dekat dengan pengeluaran rata-rata masyarakat miskin, karena Indeks Keparahkan Kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017-2022 (dalam %)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

menyumbang 14,27% atau sebesar 3,93 juta dari penduduk miskin nasional pada tahun 2021. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2021), Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan dalam program upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemiskinan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Suryana et al., 2022). Pemerintah daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mengatur daerahnya masing-masing, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah juga diharapkan turut hadir dalam upaya untuk mengintervensi pasar dalam mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya derajat kesejahteraan dan pemerataan melalui program yang konvergen dalam tugasnya (Azis et al., 2019).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka intervensi pasar dan pengentasan kemiskinan diwujudkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah dan dana desa dari pemerintah pusat, dan pendapatan lainnya. Nany (2022) menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya membiayai kebutuhannya dengan pendapatannya sendiri melainkan masih membutuhkan dana perimbangan.

Sebagai salah satu upaya menciptakan tingkat kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah diberikan tantangan dalam memungut dan mengelola keuangan daerahnya.

Tingkat kemandirian fiskal daerah dihitung dengan membandingkan jumlah PAD terhadap total pendapatan daerah (Nany, 2022). Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, rasio kemandirian daerah di Jawa Tengah masih dalam kisaran 15%-50%. Rasio tersebut mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Dalam pelaksanaan APBD, belanja daerah juga menjadi bagian terpenting dari daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Rinaldi, 2013). Belanja Modal Daerah merupakan salah satu belanja yang dapat meningkatkan infrastruktur daerah (Nurmainah, 2013). Penyediaan infrastruktur daerah diharapkan dapat memenuhi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah (Nurmainah, 2013). Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian fiskal, DAK, dan Belanja Modal Daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi masyarakat dalam ekonomi rendah. Sejalan dengan itu Wahyudi & Rejekiingsih (2013) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seorang individu dinilai tidak dapat memenuhi standar hidup minimumnya. Standar hidup yang tidak terpenuhi akan berimplikasi dan berpengaruh besar terhadap faktor-

faktor utama kehidupan seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan gaya hidup (Prameswari et al., 2021). Kemiskinan digolongkan ke dalam masalah yang cukup kompleks karena mencakup berbagai dimensi. Suryawati (2005) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah konsep yang terintegrasi yang terdiri atas lima dimensi, yaitu ketidakberdayaan, kemiskinan, ketergantungan, ketidakmampuan dalam mengatasi keadaan darurat, dan keterasingan secara geografis ataupun sosiologis.

Terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Beberapa indikator tersebut adalah pendapatan, tingkat konsumsi, angka kematian balita, persentase imunisasi, tingkat kesuburan pasangan, tingkat kematian ibu, angka harapan hidup, angka penyerapan pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan juga dapat dianalisis melalui dua dimensi yaitu dimensi moneter dan dimensi non-moneter. Dimensi non-moneter yang melekat salah satunya adalah IPM. Dimensi yang ada pada IPM menggambarkan kemiskinan secara luas dan berkaitan erat dengan *empowerment* (Lukman, 2010).

Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal diwujudkan dalam penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Berdasarkan pendapat (Christy et al., 2019), transfer ke daerah diwujudkan melalui alur penyerahan pendanaan sesuai prinsip *money follow program*. *Money follow*

program merupakan sebuah pendekatan dalam kegiatan penganggaran yang lebih berfokus kepada program/kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat daerah (Ningsih et al., 2018).

Tingkat kemandirian fiskal dapat diukur dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan. Semakin tinggi pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer maka semakin tinggi derajat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong agar secara finansial memiliki sifat independen terhadap pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi dan sumber pendapatan lainnya (Putra & Hidayat, 2016). Perhitungan tingkat kemandirian fiskal diketahui dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Derajat Desentralisasi (%)	Kemandirian
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri & Fisipol UGM, 1991

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2021, DAK Nonfisik diberikan untuk

menambah sumber pendanaan kegiatan khusus nonfisik urusan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa DAK Fisik digunakan untuk pembangunan sarana dalam pelayanan publik, sedangkan DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasional pelayanan publik, dan hibah kepada daerah sebagai dukungan pembangunan dan operasional layanan publik berdasarkan perjanjian pemerintah dengan daerah.

Penyaluran DAK ini berasal dari APBN dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN sehingga setiap tahunnya besaran DAK tidak dapat dipastikan. Optimalisasi dapat dilakukan oleh penerima DAK namun hanya untuk kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan DAK. Pertama, DAK yang seharusnya digunakan sebagai sumber dana penunjang, namun oleh pemerintah daerah digunakan sebagai sumber utama dalam Belanja Modal Daerah. Kedua, kegiatan rutin sebagai syarat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menggunakan dana dari DAK yang seharusnya kegiatan tersebut dipenuhi oleh DAU dan PAD. Ketiga, belum ada sinergi dengan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman, hibah, belanja, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program prioritas lainnya belum terlaksana dengan maksimal (Mujiwardhani et al., 2022).

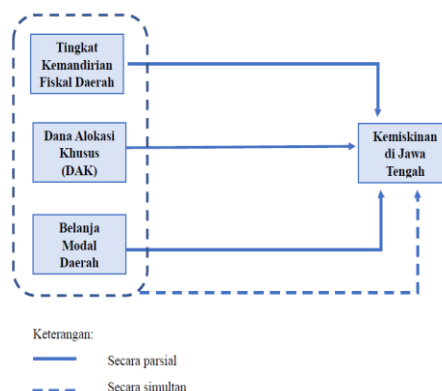
Belanja Modal Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun

2020, Belanja Modal Daerah merupakan belanja atas beban APBD dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk kegiatan pemerintahan yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam pengadaan aset, terdapat beberapa kriteria lain yang perlu dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal Daerah antara lain berwujud, dapat melebihi batas minimal kapitalisasi aset, dan diperoleh untuk digunakan oleh pemerintah guna menjalankan kegiatan operasional dan memberikan layanan dan bukan untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dana yang berasal dari Belanja Modal Daerah juga dapat meningkatkan infrastruktur baik secara industri maupun jasa. Belanja Modal Daerah seperti infrastruktur diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa datang seperti meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi maupun produktivitas masyarakat dari berbagai sektor (Astuti & Mimba, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih baik antar pengelola keuangan daerah

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti

di lingkup pemerintah daerah dalam pengelolaan Belanja Modal Daerah. Selain itu, diperlukan juga penghitungan yang lebih akurat untuk membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah (Darwis, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan Eviews 12. Data yang digunakan merupakan data *time-series* tahun 2017 s.d. 2022 dan data *cross-section* dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu Tingkat Kemandirian Fiskal (TKF), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Belanja Modal Daerah (BMD), terhadap variabel dependen, yaitu Kemiskinan sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Model regresi yang digunakan dalam analisis ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y)_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log}(\text{TKF}) + \beta_2 \text{Log}(\text{DAK}) + \beta_3 \text{Log}(\text{BMD}) + \mu_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- α = konstanta;
- β = *slope* (Koefisien regresi);
- Log = Log-Linear
- Y = Kemiskinan;
- TKF = Tingkat Kemandirian Fiskal dalam rasio;
- DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK);
- BMD = Belanja Modal Daerah;
- μ = *error*;
- i = data *time series*; dan
- t = data *cross section*.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	86.748589	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	608.697409	34	0.0000

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	70.276155	3	0.0000

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0.461025	-0.027172
X2	-0.461025	1	0.535174
X3	-0.027172	0.535174	1

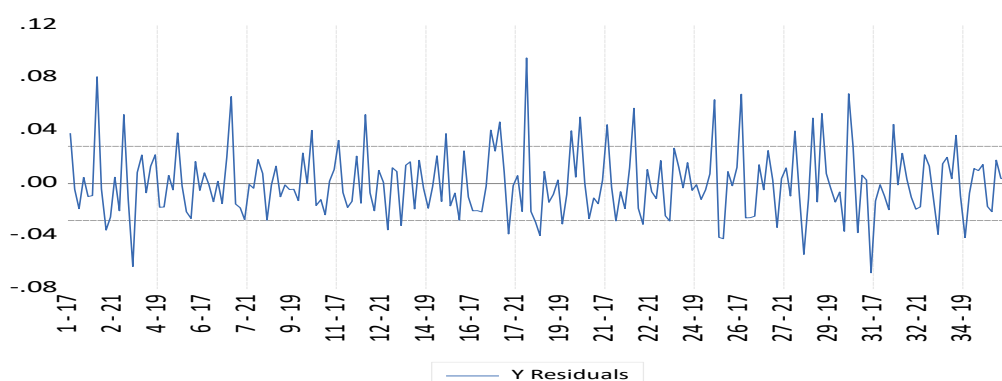
Sumber: Diolah peneliti

Tabel 5 Deskriptif Statistik

	Kemandirian Fiskal	DAK	Belanja Modal Daerah	Tingkat Kemiskinan
Mean	-0,7456501	2,4687056	2,4878445	-0,9773009
Standard Error	0,0091821	0,0131104	0,0138463	0,0103303
Median	-0,7695510	2,5082781	2,494464	-0,9586073
Mode	-0,8538719	2,4879580	2,2935835	-1
Standard Deviation	0,1330615	0,1899889	0,2006524	0,1497004

Sumber: Diolah Peneliti

Grafik 2 Residual Variabel X1, X2, X3



Sumber: Diolah peneliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Hasil uji Chow (Tabel 2) menunjukkan probabilitas (P-value) 0.000, sehingga disimpulkan model dengan FEM (*Fixed Effect Model*) lebih baik dari pada CEM (*Common Effect Model*).

Uji Hausman

Pengujian menggunakan uji Hausman (Tabel 3) mendapatkan hasil nilai probabilitas (P-value) 0.000 atau probabilitas < 0.05 . Model terbaik dalam penelitian ini adalah FEM.

Deskriptif Statistik

Pengujian deskriptif statistik sebagaimana pada Tabel 5 menyimpulkan bahwa data kemandirian fiskal dan tingkat kemiskinan memiliki variasi yang tinggi. Di sisi lain, data DAK dan Belanja Modal Daerah memiliki variasi data yang rendah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas (Tabel 4) menghasilkan nilai koefisien korelasi X1 dan X2 $-0.4610 < 0.85$; koefisien korelasi X1 dan X3 $-0.0271 < 0.85$; dan koefisien korelasi X2 dan X3 $0.5351 < 0.85$. Tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada Grafik 2. Dapat disimpulkan dari grafik residual bahwa tidak ditemukan kesamaan pada varian residual. Hal ini dikarenakan grafik residual tidak menunjukkan angka melebihi 500 batas atas dan -500 batas bawah.

Uji Regresi Linear Berganda (Hipotesis)

Uji T

Pada Tabel 6, nilai t_{hitung} variabel tingkat kemandirian fiskal daerah sebesar 4.8044 lebih besar dari t_{tabel} 1.9714. Oleh karena itu, variabel tingkat kemandirian fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Nilai t_{hitung} variabel DAK sebesar -6.1091 lebih besar dari t_{tabel} 1.9714

(6.1091 > 1.9714). Nilai signifikansi lebih kecil dari batas signifikansi. Oleh karena itu, variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Nilai t_{hitung} variabel Belanja Modal Daerah sebesar 2.0318 lebih besar dari t_{tabel} 1.9714. Oleh karena itu, variabel Belanja Modal Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Uji F

Pada Tabel 7, Nilai f_{hitung} sebesar 154.0406 lebih besar dari nilai f_{tabel} sebesar 2,648432. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Pada Tabel 7, angka *adjusted R-Squared* = 0.964404 atau 96.44%

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/28/23 Time: 11:39

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.386356	0.103014	-3.750502	0.0002
X1	0.217252	0.045219	4.804414	0.0000
X2	-0.209633	0.034315	-6.109070	0.0000
X3	0.035602	0.017522	2.031785	0.0437

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.025561	R-squared	0.970706
Mean dependent var	-0.977301	Adjusted R-squared	0.964404
S.D. dependent var	0.149700	S.E. of regression	0.028244
Akaike info criterion	-4.133600	Sum squared resid	0.137206
Schwarz criterion	-3.527933	Log likelihood	472.0280
Hannan-Quinn criter.	-3.888752	F-statistic	154.0406
Durbin-Watson stat	1.810953	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Diolah peneliti

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017 s.d. 2022 dapat dijelaskan dengan variabel independen sebesar 96.44% dan 3.56% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Dari hasil analisis data dan uji T dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian fiskal daerah memiliki nilai signifikansi probabilitas 0.000. Hasil uji persamaan regresi menunjukkan nilai koefisiensi 0.2172 yang artinya, setiap kenaikan kemandirian fiskal sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0.2172%.

Hasil pengujian dan analisis data memiliki arti bahwa peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah akan meningkatkan kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena Provinsi Jawa Tengah masih dalam tahap pertumbuhan perekonomian, ditunjukkan pada tabel 1 bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata kemandirian fiskal 19%, yaitu berada dalam interval rendah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Asmara & Suci (2014) yang mengemukakan bahwa variabel kemandirian fiskal akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2007 s.d. 2012. Penelitian tersebut menyatakan bahwa koefisien gini memiliki arti ketimpangan masyarakat akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini akan terus memicu ketimpangan pendapatan dan akan menambah angka kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, akan

berpengaruh terhadap PAD dan derajat desentralisasi. Selain itu, penelitian Nguyen (2008) juga menunjukkan bahwa kenaikan derajat desentralisasi fiskal daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan ketimpangan yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan terhadap pendapatan daerah.

Pengaruh DAK

Pengujian data DAK menunjukkan persamaan regresi linear berganda dengan nilai koefisiensi variabel X2 adalah -0.2096. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penurunan DAK sebesar 1% akan berpengaruh meningkatkan kemiskinan sebesar 0.2096%.

Pengurangan DAK akan meningkatkan kemiskinan di Jawa Tengah secara signifikan. Hal ini terjadi karena Provinsi Jawa Tengah masih memiliki interval kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah, ditunjukkan oleh Tabel 1. Pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan. Selain itu, DAK memiliki fungsi untuk pendanaan kegiatan khusus daerah seperti peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini sejalan dengan Fitriyanti & Handayani (2020) bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2012 s.d. 2016. DAK memiliki tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang diperuntukkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, daerah dapat meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana serta mengurangi

ketimpangan pelayanan dasar antardaerah.

Pengaruh Belanja Modal Daerah

Belanja Modal Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh persamaan regresi linear berganda dengan koefisien variabel X_3 sebesar 0.0356. Kenaikan sebesar 1% pada Belanja Modal Daerah akan menyebabkan kenaikan pada kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0.0356%. Uji T menunjukkan bahwa Belanja Modal Daerah memiliki pengaruh signifikan yang dibuktikan dengan nilai 0.0437 kurang dari nilai $\alpha = 0.05$.

Hasil pengujian dan analisis data memiliki arti bahwa peningkatan Belanja Modal Daerah akan meningkatkan kemiskinan di Jawa Tengah secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum secara tepat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, didapatkan data dari Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa belanja modal di Jawa Tengah digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jembatan sebesar 37.8% dan sebesar 32.1% untuk belanja modal gedung dan bangunan, sedangkan sisanya digunakan untuk belanja modal dukungan manajemen atau penunjang operasional perkantoran. Oleh sebab itu, data pada keseluruhan Belanja Modal Daerah yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat secara signifikan menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah.

Hasil penelitian Nazikha & Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2004 s.d. 2016. Hal ini disebabkan Belanja Modal Daerah belum digunakan dengan tepat untuk penyediaan infrastruktur maupun penyediaan layanan dasar untuk pengentasan kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, DAK dan Belanja Modal Daerah

Hasil analisis dan pengujian menunjukkan kenaikan sebesar 1% pada variabel independen secara bersamaan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.0432%. Hasil uji F menunjukkan nilai prob 0.0000 kurang dari nilai $\alpha = 0.05$ atau dengan nilai f , f_{hitung} 154.0406 dan nilai f_{tabel} 2.648432 sehingga $f_{hitung} > f_{tabel}$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penambahan PAD yang tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan pada masyarakat mengakibatkan terjadinya ketimpangan.

DAK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. DAK telah diperuntukkan bagi penciptaan layanan publik untuk menurunkan kemiskinan. Pengurangan DAK dapat meningkatkan kemiskinan karena pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat terkait dengan layanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Seluruh variabel independen berpengaruh simultan dan signifikan

positif terhadap kemiskinan sebesar 0.04%, artinya pemerintah provinsi dapat menggunakan alternatif lain sebagai instrumen pengentasan kemiskinan Jawa Tengah dan instrumen tersebut tidak dapat diandalkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan hanya DAK. Hal ini berarti bahwa DAK perlu dioptimalkan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengatasi kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan instrumen atau kebijakan lain yang lebih memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pengentasan kemiskinan, seperti Kredit Program (KUR dan Umi).

REFERENSI

- Asmara, A., & Suci, S. C. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41–53. https://doi.org/10.29244/jurnal_mp.d.v6i1.24645
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh belanja rutin dan belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Azis, A., Laut, L. T., Destiningsih, R., Ekonomi, F., Tidar, U., Magelang, K., & Tengah, J. (2019). *Analisis tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo*. 28(2), 44–54.
- Badan Pusat Statistika Jawa Tengah. (2023). <https://jateng.bps.go.id/>.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Serat Acitya*, 102–114.
- Christy, E., Walewangko, E. N., & Waruan, P. (2019). Dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkali Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 1–12.
- Darwis, E. T. R. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Postur APBD*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*, 9(2), 79–90.
- Istan, M. (2017). Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat menurut perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>

- Litbang Departemen dalam negeri, & Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab*.
- Lukman, M. (2010). The complementary roles of government social sector in poverty allevation in Indonesia. *Yokohama journal of social sciences*, 14(3), 75-94.
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., Nawawi, A., & Ri, K. K. (2022). *Dana alokasi khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022.
- Nany, M. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 22(03), 247-261.
- Nguyen, H. P. (2008). What is in it for the poor? Evidence from fiscal decentralization in Vietnam. *Journal of Public and International Affairs*, 19, 69-90.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131-141.
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis pengaruh kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2), 168-179.
<https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.909>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243-256.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Eksos*, 8(22), 105-113.
<https://core.ac.uk/download/pdf/11718149.pdf>
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 120-134.
<https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Suryana, N., Brata, Y. R., & Mulyanti, D. (2022). Implementation of government policies in poverty alleviation in The City Of Banjar. *Case Law: Journal of Law*, 3(2), 121-129.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 585-597.
- TNP2K. (2021). *Indikator kesejahteraan sosial utama, 35 kabupaten fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021*. Booklet TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1-15.